KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN KEMAS RINDO KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG (STUDI TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA)

Oleh

DESITA RAHAYU
Staf Pengajar Kopertis Wilayah II DPK Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bengkulu

ABSTRACT

Poverty does not just belong to the urban community that the economy condition is structurally more advanced than rural area. Poverty can be prevalent everywhere, from the central government to rural area or villages. Social and cultural dimensions of poverty are very complex in nature. This problem is related to the social attitudes. To determine whether the vendors including the poor, it has conducted research on a group of street vendors in Kelurahan Kemas Rindo District of Kertapati Palembang. Descriptive method was chosen because the researcher wanted to get a description of the phenomena that occur on the object of research. The poverty of street vendors in Kelurahan Kemas Rindo District of Kertapati Palembang is including into chronic poverty, which likely will also happen to their next generation. The policy to reduce the burden on poor people's consumption expenditure made by a variety of subsidy programs that assist the poor in accessing their basic needs, such as sufficient food, education and community productivity, and also health. The citizen productivity increasing can be done through the development and empowerment of people, especially micro, small and medium which include funding and guidance program which is related to the citizen's potention. By increasing the productivity of society and through an approach that helps communities in accessing basic needs (food, health and education), it’s hoped the poverty in Kemas Rindo area can be solved.

Keywords: poverty, productivity

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu utama bagi hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia – Negara yang kaya akan bahan tambang, kondisi alam yang subur serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Namun pada kenyataannya sangat banyak penduduk yang kurang atau bahkan tidak menikmati keuntungan hidup di bumi yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) ini. Berikut data penduduk miskin menurut daerah (lihat tabel 1):

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun


Dimensi sosial budaya kemiskinan sangat kompleks sifatnya. Ini menyangkut perilaku masyarakat (social attitudes) terhadap problem kemiskinan. Untuk mengetahui apakah pedagang kaki lima termasuk kelompok penduduk miskin, maka telah dilakukan penelitian terhadap sekelompok orang pedagang kaki lima di Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang.

Dalam ruang lingkup kebijakan publik terdapat istilah isu, istilah ini berbeda maknanya dengan definisi isu dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa definisi isu menurut pendapat ahli:

“Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu (Dunn, 1990).”
“Pada sisi lain, isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan Gunn, 1986).”

“... isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternative (alternative policies), atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friendland, 1990).”


“Digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Sementara menurut Dye (1987), “Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Jadi, kebijakan merujuk kepada keputusan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.

Karena pembuatan kebijakan publik diawali dengan adanya isu yang mencuat dan diagendakan, maka perlu diketahui criteria isu yang dapat menjadi agenda kebijakan. Berikut ini beberapa criteria tersebut menurut Wahab (1997):

1. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu; sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja
2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatic.
3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari udit kepentingan orang banyak
4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
5. Isu tersebut mempersalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
6. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia memenuhi kriteria untuk masuk dalam agenda kebijakan.
METODE PENELITIAN


Kata ‘miskin’ sendiri didefinisikan oleh Sharp (2000) “… is concerned with the relationship between the minimum needs of the people and their ability to satisfy those needs.” Artinya, bila seorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimumnya maka ia tergolong miskin. Sementara Hill (2002) mengatakan bahwa:

Bagi para akademisi, ahli statistik di BPS, dan pemerintah, “kemiskinan” didefinisikan dan dialisis sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang definisinya bervariasi.

Lauer (1992) berpendapat, “The poor get less of everything we consider important and necessary for a decent life (less money, food, clothing, and shelter)”.


1) secara politik : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
2) Secara social : tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
3) Secara ekonomi : rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampan yang berdampak pada penghasilan
4) Secara budaya dan tata nilai : terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperto etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme
5) Secara lingkungan hidup, rendahnya pemilikan asset fisik termasuk asset lingkungan hidup, seperti air bersih, dan penerangan.

Ciri-ciri masyarakat miskin tersebut mengindikasikan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan yang terdiri dari berbagai sumber dimulai dari sumber ekonomi sampai dengan sumber lingkungan hidup.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pemerintah perlu membuat formula baru agar angka ketergantungan antara pusat dan daerah tidak terlalu besar. Soalnya hiruk pikuk ekonomi berlari-lari di kota-kota besar saja. Sedangkan kota-kota kecil atau daerah pinggiran terjerembab pada

Begitu pula dengan para pedagang kaki lima di Kertapati, mereka merupakan produk SDM yang rendah mutunya karena rata-rata tidak atau hanya tamat SD. Ketidakmampuan melanjutkan pendidikan merupakan indikasi ketidakmampuan memperoleh sumber pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada aspek ekonomi sebagian besar pedagang mulai usaha dengan keterbatasan modal cenderung sangat minim. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan “... dahulu tahun 2004, dik. Hanya dengan modal lima puluh ribu rupiah.“ Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa rata-rata para pedagang termotivasi berjualan karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pokok ditambah lagi tidak adanya larangan secara frontal terhadap pedagang di daerah kertapati seperti yang terjadi di pasar 16 Palembang, walaupun dengan keterbatasan modal sehingga mereka tumbuh menjadi pedagang “liar”.

Selama rentang waktu 5 (lima tahun terakhir saja) belum pernah ada pedagang kaki lima di daerah Kemas Rindo yang mendapat teguran atau penertiban dari Polisi Pamong praja menjadikan para pedagang ini cenderung merasa aman dalam berjualan sehingga cenderung tidak ada permasalahan yang rumit yang harus dipecahkan dan membutuhkan penanganan khusus.


Saefuddin dkk (2003:6) mengatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia dibedakan menjadi:

a) kemiskinan kronis (chronic poverty) atau kemiskinan structural; yang terjadi terus-menerus
b) kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis.


Teori tricle down effect yang menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan multiplier effect yang besar dan akan menyebar ke semua lapisan masyarakat dengan baik, ternyata tidak dapat berjalan. Di Indonesia, berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara sektoral. Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang didasari oleh Keppres RI No. 124 tahun 2001, pada 7 Desember 2001 merupakan bentuk pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan dari jalur struktural.

Komite ini menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 cara, yaitu:

a. mengurangi beban pengeluaran konsumsi ke kelompok miskin
b. meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.
Upaya untuk mengurangi beban pengeluaran konsumsi masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai program subsidi yang membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok, yang meliputi pangan, pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan produktivitas masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan.

Upaya pengentasan kelompok pedagang kaki lima dari kemiskinan, dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas masyarakat maupun melalui pendekatan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok (pangan, kesehatan dan pendidikan).

**KESIMPULAN**


Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah sebagian masyarakat tidak mampu mengakses pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, dan nutrisi yang baik. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kualitas SDM yang aspek intelektual, fisik, dan produktivitasnya rendah. Karena rendahnya kualitas SDM, maka kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang cenderung tepat dalam memberantas kemiskinan ini adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga potensi yang ada di masyarakat dimanfaatkan dengan bantuan pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan.
DAFTAR PUSTAKA


Sumber Lain :

tkpkri.org/data-kemiskinan